

PUBLIK

Bangun Citra Positif Pemasyarakatan, Bapas Nusakambangan Ikuti Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan

Rifki Maulana - CILACAP.PUBLIK.CO.ID

Sep 7, 2023 - 12:51



Bangun Citra Positif Pemasyarakatan, Bapas Nusakambangan Ikuti Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan

Nusakambangan - Balai Pemasyarakatan Kelas II Nusakambangan mengikuti Zoom Meeting Pembukaan Acara Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan Tahun 2023 pada Rabu (6/9).

Dalam rangka mendukung Direktorat Jenderal Pemasyarakatan membangun citra positif Pemasyarakatan melalui strategi komunikasi massa dan publikasi yang efektif, terutama dalam penanganan situasi krisis, diselenggarakan kegiatan Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan "Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan", dibuka langsung oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga terpusat di Novotel Jakarta Mangga Dua.

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari (06 – 08 September 2023) ini, diikuti oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan beserta Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang telah ditunjuk sebagai 50 UPT Percontohan Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan dan satu anggota Tim Humas.

Setiap petugas pemasyarakatan berperan untuk menyampaikan informasi program dan hasil kinerja pemasyarakatan. Bahkan, saat terjadi krisis, petugas pemasyarakatan juga harus mampu melakukan klarifikasi dan komunikasi. Hal itu ditegaskan Direktur Jenderal Pemasyarakatan, Reynhard Silitonga, di hadapan seluruh jajaran Pemasyarakatan se-Indonesia dalam kegiatan Pembentukan Agen Informasi dan Publikasi Pemasyarakatan: Manajemen Komunikasi Krisis Pemasyarakatan, Bangun Citra dan reputasi Positif Pemasyarakatan untuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia PASTI.

“Isu-isu krisis Pemasyarakatan berpotensi besar menggoyahkan kepercayaan publik terhadap Pemasyarakatan. Bahkan, berpengaruh terhadap citra dan reputasi Pemasyarakatan. Kita tidak bisa menghindari adanya pemberitaan negatif tentang Pemasyarakatan, apalagi tren viral dari platform media sosial,” ujar Reynhard.

Potensi terjadinya krisis yang tinggi di lingkup pemasyarakatan menjadikan tahun ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan memperkuat jajarannya pemasyarakatan dalam manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan. Sepanjang tahun 2023 berlangsung, terdapat 103.954 berita positif pemasyarakatan yang telah terpublikasi melalui media. Namun demikian, masih terdapat 2.478 berita negatif yang telah beredar di masyarakat yang dapat memantik krisis komunikasi di pemasyarakatan.

“Saya berikan apresiasi untuk seluruh jajaran pemasyarakatan yang tak lelah mempublikasikan berita positif pemasyarakatan, khususnya pemangku fungsi kehumasan di seluruh satuan kerja. Kita patut bersyukur dan berbangga hati kinerja positif kita semakin disadari dan dipahami masyarakat. Namun, masih adanya berita negatif menjadikan kita punya tanggung jawab untuk berkinerja baik dan mampu melakukan komunikasi pada situasi krisis,” tutur Reynhard. Reynhard mengungkapkan bahwa situasi krisis yang terjadi dapat berdampak serius pada organisasi, juga keselamatan publik, kerusakan harta-benda material, hingga kehilangan reputasi dan kepercayaan publik. Untuk itu lah manajemen komunikasi krisis diperlukan. Lebih jauh, penerapan manajemen komunikasi krisis pemasyarakatan ini juga merupakan tindak lanjut pasca disahkannya Grand Strategy Komunikasi Humas Pemasyarakatan di tahun 2022.

“Kepala Divisi Pemasyarakatan dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan bersama fungsi humasnya harus memiliki kemampuan melakukan deteksi dan mitigasi sesegera mungkin, khususnya terhadap suatu isu atau situasi krisis. Dimulai sejak pra-krisis, krisis, hingga pasca-krisis. Panduan pelaksanaannya telah disusun, dan selama tiga hari ke depan kita akan berlatih dan sharing knowledge,” tambahnya.

Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Pemasyarakatan untuk dapat meningkatkan tata Kelola koordinasi dan komunikasi yang lebih baik khususnya dalam situasi krisis. Khusus bagi peserta yang mengikuti pelatihan secara langsung agar dapat berbagi pengetahuan dengan UPT Pemasyarakatan lainnya di wilayah yang sama.